

Analisis Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani pada Komunitas Petani Padi di Lokasi *Food Estate*

Analysis Farmer Economic Institutional Strengthening in Rice Farming Communities at Food Estate Location

Yoyon Haryanto^{1,*}, Momon Rusmono¹, Aminudin¹, Titis Pury Purboingtyas¹, Gunawan²

¹Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Jawa Barat – BPPSDMP Kementerian Pertanian

²Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Jawa Timur – Kementerian Pertanian

*E-mail korespondensi: yoyonharyanto@gmail.com

Diterima: 10 Juni 2022 | Disetujui: 20 September 2022 | Publikasi Online: 22 September 2022

ABSTRACT

The Farmer's Economic Institution (FEI) was formed due to similarities, having the aim of managing their farming business on the basis of togetherness and fulfillment of facilities. The presence of the food estate program provides acceleration in its growth, but does it have a good impact on the performance of the institution. The purpose of this study was to described the institutional performance that supports FEI in food estate locations, analyze the dominant factors that affect FEI in food estate locations and formulate a strategy for operationally developing FEI at food estate locations. This study used a survey method with purposive sampling technique, obtained 40 farmers who are members of farmer institutions supporting the formation of FEI in the food estate of Pulang Pisau, Central Kalimantan. Data collection was carried out from February to May 2022. Data processing used descriptive techniques and Partial Least Square. The results show that the variables that have a strong influence on the institutional character are social aspects and profitability aspects, with the characteristics of its members being having a relatively low level of education and having fairly good business experience with good technical aspects but weak in managerial mastery.

Keywords: *Farmers, food estates, institutions, rice*

ABSTRAK

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terbentuk akibat terdapat ikatan berlandaskan kesamaan usaha, memiliki tujuan pengelolaan usaha tani berlandaskan berdasar kebersamaan maupun pemenuhan estimasi usaha. Hadirnya Program *food estate* memberikan akselerasi dalam penumbuhannya, namun belum diketahui memberikan dampak yang baik terhadap kinerja kelembagaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis performa kelembagaan yang mendukung KEP di lokasi *food estate*, menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi KEP di lokasi *food estate* dan merumuskan strategi pengembangan KEP secara operasional di lokasi *food estate*. Kajian ini mempergunakan metode survei dan didukung oleh teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, didapat 40 orang petani yang tergabung dalam kelembagaan petani pendukung terbentuknya KEP di *food estate* Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Mengumpulkan data terlaksana sejak Februari hingga Mei 2022. Olah data mempergunakan teknik deskriptif dan *partial least square*. Hasil kajian memperlihatkan bila variabel yang memengaruhi kuat dalam karakter kelembagaan adalah aspek sosial dan dan aspek profitabilitas, dengan penciri anggotanya adalah memiliki tingkat pendidikan yang cenderung rendah dan mempunyai pengalaman berusaha yang cukup baik dengan aspek teknis yang baik, tetapi lemah dalam penguasaan manajerial.

Kata kunci: *Food estate, kelembagaan, padi, petani*



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia.

E-ISSN: 2442-4110 | P-ISSN: 1858-2664

PENDAHULUAN

Bidang pertanian berperan sebagai penyedia pangan yang krusial untuk menjaga stabilitas suatu negara. Bidang pertanian berkontribusi pula terhadap devisa dan mendukung sektor industri sehingga tidak bisa terabaikan. Bidang pertanian pun berperan sebagai pengaman saat bidang ekonomi terjadi krisis, sedangkan bidang/sektor lainnya tidak mampu menghadapi kondisi perekonomian itu (Santosa dan Darwanto, 2015). Namun, realitas yang patut diakui bila sektor pertanian di Indonesia mayoritas dirancang oleh petani dengan unit usaha yang terkesan sempit. Data Badan Pusat Statistik (2010), mencatat jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sejumlah 104,485,444 orang, 41.5% bekerja pada sektor pertanian. Kondisi pelaku utama pertanian itu di tiap tahunnya makin bertambah jumlah, tetapi fakta di lapangan tingkat kesejahteraan mereka relatif masih rendah.

Minimnya tingkat kesejahteraan petani tampak melalui hasil sementara sensor pertanian 2003 yang berlainan dengan sensus pertanian 1993. Rumah tangga petani gurem yang memiliki penguasaan lahan sekitar 0,5 hektar, baik atas kepemilikan pribadi atau penyewaan, pada tahun 1993 sekarang 51,9% dari 20,8 juta rumah tangga petani. Tahun 2003 atau satu dekade selanjutnya, tingkat petani gurem meningkat menjadi 53,9% dari jumlah keseluruhan rumah tangga petani. Tahun 2018, persentase petani gurem diprediksi meningkat menjadi 55,5% (Sutas BPS 2018). Peningkatan persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan memberi indikasi bila petani Indonesia makin miskin, yang terlibat melalui keterbatasan infrastruktur ekonomi, minimal kesempatan kerja di luar pertanian (*nonfarm*), jarak ke pasar tergolong jauh, kesulitan memperoleh akses ke sumber pemodal maupun teknologi, dan lemahnya organisasi tani (Yustika, 2013).

Terdapat bermacam usaha yang sudah pemerintah laksanakan demi mengoptimalkan taraf hidup petani dan peningkatan produksi pertanian, salah satunya melalui penguatan kelembagaan petani atau organisasi petani dari level desa hingga nasional menjadi kelembagaan petani yang berbasis profit dan ekonomi. Perihal ini dimaksudkan supaya melalui peningkatan peran kelembagaan petani tersebut bisa menunjang petani melaksanakan usaha taninya secara lebih efektif dan efisien berskala komersil mulai dari penyediaan input produksi, perawatan sampai pascapanen. Berbagai pihak, baik pemerintah ataupun swasta berusaha membantu petani agar bisa mengoptimalkan penghasilan maupun kesejahteraan petani tersebut, termasuk melalui peningkatan peranan kelembagaan (ekonomi) petani di Indonesia.

Kelembagaan agribisnis atau kelembagaan ekonomi petani di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, dianggap memiliki kinerja yang kurang maksimal terkait peningkatan penghasilan petani (Manalu, 2011). Kelembagaan ekonomi yang acap dijumpai, meliputi koperasi, yang kerap bercitra buruk bagi petani sebab belum bisa melaksanakan fungsi selaku kelembagaan secara optimal terkait upaya membantu petani memaksimalkan posisi tawar menawar maupun penghasilan dan kesejahteraan petani. Baga *et al*, (2009) mengklasifikasikan dua tahap pembentukan kelembagaan agrobisnis atau kelembagaan ekonomi petani, seperti kelembagaan yang tumbuh secara alamiah dan atas dasar kesengajaan dalam pembentukannya demi memperoleh tujuan tertentu demi kepentingan bersama. Melalui pembentukan kelembagaan itu, maka bisa mengidentifikasi dengan mencermati kriteria kelembagaan yang tumbuh secara alamiah, yaitu pembentukan akibat ada kebutuhan masyarakat, terlaksana selama rentang waktu yang sifatnya informal dan kerap tidak tertulis. Lain dengan kelembagaan yang sengaja terbentuk mempunyai kriteria, yaitu terdapat rancangan pada tahap pembentukan, bersifat formal, dan secara umum sifatnya tertulis.

Semenjak tahun 2019, di beberapa wilayah Indonesia tengah mengembangkan korporasi petani sebagai wujud Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), terutama di wilayah/daerah pusat produksi padi dan mengoptimalkan lahan rawa sebagai salah satu upaya ekstensifikasi pertanian yang dikenal dengan program *Food Estate*. Pengembangan KEP di lokasi *food estate* tergolong sebagai kelembagaan yang terbentuk secara sengaja demi memperoleh tujuan yang bermanfaat untuk petani, terkhusus terkait penghasilan maupun pengetahuan petani, mempermudah petani untuk mendapat modal kerja, mempermudah petani terkait penjualan hasil panen demi mengoptimalkan produktivitas hasil, serta berkontribusi signifikan terkait ketahanan pangan nasional. Selain itu, pengembangan KEP di lokasi *Food Estate* dimaksudkan untuk memberdayakan dan melibatkan keterlibatan petani terkait pengelolaan usaha mulai ketersediaan samprotan, budidaya, sampai panen maupun pascapanen. Target yang direncanakan, yaitu meningkatkan penghasilan petani melalui lembaga komersial berkelanjutan (korporasi) atas kepemilikan bersama.

Namun, tanpa mengesampingkan sumbangsih terhadap pembangunan pertanian, kelembagaan ekonomi petani masih berkuat dengan berbagai macam permasalahan dalam membantu petani berdaya terutama dalam hal karakter dan performanya, padahal pentingnya KEP mendapat pengakuan dalam pembangunan pertanian di negara industri atau negara berkembang seperti halnya Indonesia. Kelembagaan pada usaha tani berperan krusial di hampir seluruh tahapan usaha tani. Hanya saja, realitas menampakkan bila kelembagaan petani di negara berkembang cenderung lemah dan ada bermacam kendala dalam menumbuhkan kelembagaan dalam masyarakat petani (Anantanyu, 2011). Padahal KEP dirancang agar bisa membantu petani keluar dari permasalahan kesenjangan ekonomi, tetapi hingga sekarang belum berperan optimal. Kajian ini terfokus guna menetapkan secara perinci karakteristik KEP di lokasi *food estate* dengan tujuan untuk menganalisis karakter kelembagaan yang mendukung KEP dan faktor yang berpengaruh terhadap KEP di lokasi *food estate*.

METODE

Kajian ini dirancang mempergunakan metode/prosedur survei berpendekatan kuantitatif, serta didukung oleh data kualitatif. Perumusan masalah kajian didukung dengan merumuskan tujuan dan merumuskan hipotesis yang teruji dari statistik terapan. Kajian *explanatory* merupakan kajian yang menjabarkan keterkaitan kausal dan pengaruh, serta hubungan sebab akibat (Darmawan, 2013).

Populasi pada kajian ini, yaitu petani yang berada disuatu kelembagaan petani pendukung terbentuknya KEP di lokasi *food estate* Belanti Siam, Pulang Pisau Kalimantan Tengah berjumlah 40 petani. Sehubungan dengan memungkinkannya jumlah populasi menjadi sampel penelitian maka seluruh populasi menjadi sampel kajian.

Variabel pada kajian ini, seperti ciri anggota kelembagaan petani (X_1), performa kelembagaan petani (X_2), aspek manajerial (X_3), peranan sosial (X_4), aspek teknis (X_5) dan aspek profitabilitas (X_6). Sementara variabel terikat terdiri atas; karakter KEP (Y_1), kemandirian petani (Y_2), dan ketahanan pangan (Y_3). Ciri anggota kelembagaan petani (X_1) meliputi usia, tingkat pendidikan formal maupun nonformal, luas penguasaan lahan, serta lama berusahatani. Performa kelembagaan petani (X_2) terdiri atas proses pembelajaran, unit produksi dan kerjasama. Selanjutnya, aspek manajerial (X_3) terdiri atas pengelolaan usaha, pengelolaan jejaring kemitraan, pengelolaan sumber daya yang ada, dan pengelolaan konflik yang terjadi. Aspek sosial (X_4) meliputi keterlibatan atau peran dalam pengembangan masyarakat melalui pendidikan atau agama, pengembangan masyarakat dari aspek ekonomi, pengembangan masyarakat dalam aspek kelompok dan organisasi, dan pengembangan program pembangunan, aspek teknis (X_5) terdiri atas memilih komoditas, teknis budidaya tanaman yang diusahakan, pemanfaatan media sosial untuk mendukung usaha, dan pengaplikasian sarana digital serta aspek profitabilitas (X_6) terdiri atas modal, jenis usaha dan pendapatan kelompok. Bagian karakter KEP (Y_1) terdiri atas sejumlah ciri atau kompetensi yang dominan dari hasil analisis deskriptif. Kemandirian petani (Y_2), yaitu daya adaptasi petani terhadap perubahan dari non komersial menjadi profitabilitas, sedangkan ketahanan pangan (Y_3) adalah kondisi dimana keadaan tidak terjadi gejolak, pangan tersedia di tengah masyarakat. Hipotesis penelitian ini adalah ciri anggota kelembagaan petani, performa kelembagaan petani, aspek manajerial, peranan sosial, aspek teknis dan aspek profitabilitas memiliki pengaruh langsung secara nyata dalam karakter KEP, kemandirian petani dan ketahanan pangan.

Data primer dikumpulkan langsung dari sumber utama, yakni para petani yang tergabung dalam kelembagaan petani yang dijadikan sampel kajian melalui teknik wawancara mempergunakan panduan angket dan pengamatan di lapangan, serta wawancara mendalam ke petani dan dinas terkait. Data sekunder didapat melalui pencatatan data yang terdapat di lembaga terkait dengan fokus kajian. Pengujian instrumen terlaksana ke petani yang mempunyai karakteristik serupa dan terdampak program Korporasi Petani di Kab. Karawang sejumlah tiga puluh orang. Hasil uji coba terlihat bila angket pantas dipergunakan dengan nilai pengujian validitas 0.349 – 0.703 dan nilai pengujian reliabilitas sejumlah 0.881. Teknis analisis data mempergunakan deskriptif dan *SEM PLS*. Sebelum mengolah data mempergunakan *path analysis*, dilaksanakan transformasi data dari ordinal ke interval (Sumardjo, 1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ciri Anggota Kelembagaan Petani

Kriteria anggota kelembagaan petani, seperti usia, pendidikan formal, luas lahan garapan yang petani miliki, dan pengalaman berusaha tani. Situasi ciri anggota kelembagaan petani secara menyeluruh berkategori tinggi, terutama di luas lahan garapan maupun pengalaman berusaha tani. Sekadar di tingkat pendidikan di setiap anggota dalam kelembagaan petani masih rendah. Perihal ini disebabkan mayoritas para petani yang tergabung dalam kelompok adalah transmigran yang berasal dari Pulau Jawa yang lebih cenderung untuk kegiatan berusahatani sehingga tidak memikirkan terkait dengan pendidikan formal dan terbatasnya sarana pendidikan di lokasi yang membuat akses terhadap pendidikan terbat. Golongan usia petani milenial mayoritas ada di golongan pertengahan kedewasaan dengan artian didominasi kaum tua. Selengkapny ciri anggota kelembagaan petani tertera di Tabel 1.

Mayoritas informan ada pada rentang usia produktif yang dicirikan dengan kemampuan fisik yang baik. Memiliki karakter pekerja keras dan kerap mencari kesempatan atau informasi yang menguntungkan bagi aktivitas terkait upaya mengoptimalkan kesejahteraan maupun memperoleh prestise diri, lalu mengakhirinya dengan kepuasan atas kesuksesan yang didapat. Berdasarkan pada kajian milik Effendy (2020), yaitu sebagian besar petani yang bergerak pada penumbuhan KEP berada pada usia produktif.

Tabel 1. Ciri Anggota Kelembagaan Petani

Ciri Anggota Kelembagaan Petani	Jumlah	Persentase
Usia (tahun)		
Awal Kedewasaan (18 hingga 30)	2	5,0
Pertengahan Kedewasaan (31 hingga 60)	38	95,0
Rerata = 48 tahun		
Pendidikan Formal (tahun)		
Rendah (2 hingga 9)	36	90,0
Tinggi (10 hingga 16)	4	10,0
Rerata = 8 tahun		
Luas Lahan Garapan (hektar)		
Rendah (di bawah 2,5)	22	55,0
Tinggi (di atas 2,5)	18	45,0
Rerata = 2,8 hektar		
Pengalaman berusahatani (tahun)		
Rendah (di bawah 10)	2	5,0
Tinggi (di atas 10)	38	95,0
Rerata = 12 tahun		

Penjelasan: n=40

Pendidikan formal ialah pencapaian pendidikan yang pernah informan ikuti berbentuk hitungan tahun. Rerata pendidikan formal pendidikan informan berkategori rendah, yakni 8 tahun atau di atas lulusan sekolah menengah pertama. Pendidikan informan 90% mayoritas berpendidikan rendah. Meskipun dari sisi pendidikan rendah, namun secara umum petani yang berada di lokasi memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh petani lainnya terutama dalam pengelolaan usaha tani. Hasil kajian milik Alonge *et al.* (2014) menjelaskan bila pendidikan terkait kemandirian individu. Hasil kajian lain pun menampakkan pendidikan memengaruhi kompetensi individu setiap melaksanakan pekerjaan (Subagio, 2008; Fatchiya, 2010; Yunita *et al.* 2012), maka bisa diperjelas bila pendidikan ialah sesuatu yang berkaitan dengan cara seseorang berpikir maupun bertindak berdasar pada kapasitas yang dimiliki.

Kajian ini sesuai kajian milik Riana *et al.* (2015), menyebut bila keterbatasan petani secara menyeluruh mengakibatkan pendidikan mereka tergolong rendah. Pendidikan formal yang rendah pada diri petani tidak menyebabkan reaksi petani dalam keterlibatan program pemerintah rendah. Perihal ini karena petani di lokasi *food estate* bisa berpikiran rasional dan memiliki wawasan luas sehingga bisa memproduksi maupun merawat mutu produk berdasar pada permintaan pasar, bisa mencermati peluang pasar dan berinovasi pada kebutuhan, serta bisa membagikannya ke petani mitra. Perihal ini memperjelas bila dukungan pendidikan yang layak bisa memengaruhi kompetensi seseorang setiap melaksanakan suatu tindakan (pekerjaan) (Fatchiya, 2010; Yunita *et al.* 2012;

Haryanto, 2018). Makin tingginya tingkat pendidikan seseorang, tentu bisa memengaruhi cara berpikirnya, termasuk sikap maupun perilaku ke arah yang rasional terkait penerimaan dan pemahaman atas inovasi yang didapatkannya (Prawiranegara, 2016; Haryanto *et al.* 2018).

Luas lahan garapan yang petani kelola/miliki mayoritas berkategori tinggi. Perihal ini memperlihatkan bila petani cenderung beradaptasi dengan perkembangan sektor pertanian sekarang ini. Rentang waktu pengalaman berusaha tani, terutama bagi petani milenial, selama 10 tahun dan paling lama 30 tahun. Rerata petani milenial berpengalaman dalam berusaha tani, yakni 16 tahun. Rentang waktu pengalaman berusaha tani bisa berimbas ke metode penentuan keputusan untuk menangani masalah pada usaha taninya. Makin lama pengalaman usaha tani, maka pengalaman itu bisa dijadikan pertimbangan setiap penentuan keputusan, serta manfaat lain pun bermanfaat untuk mengembangkan usaha tani. Sudarko (2010) memaparkan uraian yang serupa, yakni pengalaman usaha tani yang makin lama, tentu nilai usaha tani di dalam kelompok dan keterlibatan dalam aktivitas masyarakat makin meningkat pula.

Performa Kelembagaan Petani

Aspek performa kelembagaan petani ialah kinerja yang dimiliki oleh organisasi petani yang ada di lokasi *food estate*. Sesuai analisis deskriptif pada indikator aspek performa kelembagaan petani di daerah *food estate* yang berkategori tinggi, terdapat dua indikator dan satu indikator berkategori rendah, seperti indikator kerjasama. Terlampir sebaran nilai setiap indikator di kompetensi manajerial petani yang tertera di Tabel 2.

Tabel 2. Performa Kelembagaan Petani

Performa Kelembagaan Petani	Jumlah	Persentase
Proses Pembelajaran		
Rendah ($\leq 2,55$)	15	37,5
Tinggi ($> 2,55$)	25	62,5
Rataan = 2,55		
Kerjasama		
Rendah ($\leq 2,00$)	26	65,0
Tinggi ($> 2,00$)	14	35,0
Rataan = 2,00		
Unit Produksi		
Rendah ($\leq 2,18$)	15	37,5
Tinggi ($> 2,18$)	25	62,5
Rataan = 2,18		

Penjelasan: n=40

Kelemahan pada performa kelembagaan petani berdasarkan hasil penelitian ini adalah dalam hal kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu hal yang menunjukkan bentuk komunikasi dan koordinasi antar anggota dan luar anggota oleh karena itu kerjasama menjadi cerminan dalam sebuah organisasi. Kehadiran kelembagaan petani berlandaskan kerja sama yang petani lakukan selama pengolahan sumber daya pertanian. Kajian ini berlainan dengan kajian milik Santosa dan Darwanto (2015), menyebut bila permasalahan utama dalam kelembagaan petani terletak pada fungsi dan peran kelembagaan dalam menjembatani petani dengan pengusaha pertanian. Oleh karena itu, penguatan kerjasama perlu dilakukan untuk meningkatkan performa kelembagaan petani baik penguatan internal oleh sesama anggota dan penguatan eksternal melalui pembinaan dari penyuluh pertanian dan *stakeholder* lainnya.

Aspek Manajerial

Sesuai analisis deskriptif dari empat indikator aspek manajerial petani di wilayah *food estate* yang berkategori tinggi. Terlampir sebaran nilai setiap indikator di kompetensi manajerial petani milenial yang tertera di Tabel 3.

Tabel 3. Aspek Manajerial

Aspek Manajerial	Jumlah	Persentase
Pengelolaan Usaha		
Rendah ($\leq 2,35$)	9	22,5
Tinggi ($> 2,35$)	31	77,5
Rerata = 2,35		
Mengelola Jejaring Kemitraan		
Rendah ($\leq 2,45$)	18	45,0
Tinggi ($> 2,45$)	22	55,0
Rerata = 2,45		
Mengelola Sumberdaya		
Rendah ($\leq 2,58$)	18	45,0
Tinggi ($> 2,58$)	22	55,0
Rerata = 2,58		
Mengelola Konflik		
Rendah ($\leq 2,75$)	29	72,5
Tinggi ($> 2,75$)	11	27,5
Rerata = 2,75		

Penjelasan: n=40

Hasil kajian memperlihatkan bila aspek manajerial petani memiliki kelemahan, yaitu terkait kompetensi pengolahan konflik, baik dari diri sendiri (internal) maupun terkait lingkungan usaha tani (eksternal). Kondisi ini diakibatkan dari sisi pendidikan petani yang berkecenderungan ke pendidikan rendah, maka kerap tidak memikirkan jangka panjang selama penentuan keputusan. Perihal ini berimbas ke jumlah konflik yang muncul akibat pengambilan keputusan itu. Atas dasar itulah, petani yang tergabung dalam kelompok terutama pada lokasi *food estate* membutuhkan tenaga ahli sebagai pendamping usaha tani agar pengambilan keputusan sudah mendapat saran dari ahli/pakar pendamping tersebut. Tenaga ahli atau bisa disebut mentor pun berlatar belakang dari penyuluh pertanian atau pelaku usaha yang berperan sebagai mitra bagi petani milenial itu. Tata kelola konflik berkaitan dengan tahap kemandirian petani sehingga makin matang setiap bertindak dalam mengembangkan usaha mereka. Abas (2016) dan Emery (2014) menuturkan bila kemandirian petani sebagai tahap yang memerlukan waktu lama, khususnya petani yang berpendidikan rendah. Abas (2016) turut memperjelas bila pendidikan petani makin tinggi, tentu petani makin berpeluang sebagai pemikir independen. Kemandirian petani bisa muncul akibat ada kerja sama antarpetani maupun organisasi petani yang terlaksana dengan baik (Niska *et al.* 2012 ; Sutherland dan Burton 2011; Emery dan Franks, 2012 ; dan Emery, 2014). Kemandirian petani terpengaruh oleh kompetensi manajerial, sosial, maupun inovasi yang mereka miliki (Idoma dan Muhammad, 2013; Ruhimat, 2014). Atas dasar itulah, peranan pemerintah tetap diperlukan demi mengoptimalkan kompetensi petani milenial, terkhusus melalui jalur pendidikan nonformal agar bisa menjadi pribadi yang lekat dengan pembaruan (Utami dan Sumardjo, 2006; Idoma dan Muhammad, 2013).

Aspek Sosial

Sesuai analisis deskriptif dari empat indikator aspek sosial kelembagaan di wilayah *food estate*, ada satu indikator yang berkategori tinggi, yakni indikator keterlibatan dalam pengembangan pembangunan pertanian. Lalu, tiga indikator lain berkategori rendah. Terlampir sebaran nilai setiap indikator yang ada di kompetensi sosial pada diri petani milenial yang tertera di Tabel 4.

Tabel 4. Aspek Sosial

Aspek Sosial	Jumlah	Persentase
Keterlibatan dalam Pengembangan Masyarakat di Aspek Pendidikan		
Rendah ($\leq 2,18$)	24	60,0
Tinggi ($> 2,18$)	16	40,0
Rerata = 2,18		
Keterlibatan dalam Pengembangan Masyarakat di Aspek Ekonomi		
Rendah ($\leq 2,28$)	22	55,0
Tinggi ($> 2,28$)	18	45,0
Rerata = 2,28		

Lanjutan Tabel 4

Aspek Sosial	Jumlah	Persentase
Keterlibatan dalam Pengembangan Masyarakat di Aspek Organisasi		
Rendah ($\leq 2,28$)	23	57,5
Tinggi ($> 2,28$)	17	42,5
Rerata = 2,28		
Keterlibatan dalam Pengembangan Program Pembangunan Pertanian		
Rendah ($\leq 2,33$)	20	50,0
Tinggi ($> 2,33$)	20	50,0
Rerata = 2,33		

Penjelasan: n=40

Keterlibatan dalam pengembangan masyarakat, khususnya aspek pendidikan, organisasi maupun pembangunan pertanian sebagai indikator aspek sosial dengan kategori rendah pada kelembagaan petani di lokasi *food estate*. Perihal ini diakibatkan mayoritas petani belum terhubung ke kelembagaan petani maupun pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya, maka petani belumlah optimal dalam memanfaatkan organisasi untuk memperoleh dan memberi pengetahuan maupun keterampilan ke petani lain, serta berorganisasi antarpetani. Tidak hanya itu, fokus aktivitas petani berkecenderungan meningkatkan usaha tani, maka aspek sosial yang terlihat ialah partisipasi dalam pengembangan masyarakat di aspek perekonomian dengan mendayagunakan dan mengajak generasi muda agar membantu atau berpartisipasi pada usaha tani.

Atas dasar itulah, petani yang tergabung dalam kelembagaan pada hasil riset ini belum menjadi pendamping kuat untuk mendampingi petani lainnya di luar lokasi *food estate* sebab belum sesuai persyaratan selaku pendamping. Zedadra *et al.*, (2019) menuturkan bila peranan pendamping secara umum meliputi empat peranan, seperti pendidik, fasilitator, perwakilan masyarakat, serta peranan teknis bagi masyarakat miskin yang mereka dampingi. Petani milenial cenderung rendah dalam memainkan peran selaku pendidik maupun peranan teknis lain sehingga masih membutuhkan pelatihan dan pendampingan, termasuk partisipasi pemerintah guna menguatkan kemampuan sosial petani tersebut. Aspek sosial merupakan landasan bagi modal sosial melalui gagasan bila anggota masyarakat yang tidak mungkin secara perseorangan menangani bermacam permasalahan sehingga memerlukan kebersamaan dan kerja sama dari beberapa anggota masyarakat terkait dalam menangani permasalahan itu (Syahra, 2003). Modal sosial ialah aset yang diperoleh saat seseorang menjalin interaksi, menghasilkan hubungan kepercayaan maupun pemahaman umum (Gotschi *et al.* 2008). Sobel (2002) menuturkan bila modal sosial merepresentasikan kondisi ketika seseorang bisa mempergunakan keanggotaannya ke kelompok dan jaringan agar bisa mengamankan kebermanfaatannya. Sesuai perihal itu, antarpetani dalam kelembagaan, terkhusus di wilayah *food estate* harus memaksimalkan interaksi dengan tokoh masyarakat dan organisasi sosial di pedesaan agar bisa menguatkan aspek sosial itu.

Aspek Teknis

Ketiga indikator aspek teknis berkategori tinggi, tetapi sekadar aspek teknis pada pemilihan komoditas berdasar tipologi yang berkategori rendah. Lalu, sebaran nilai tiap indikator di kompetensi teknis petani milenial tertera di Tabel 5.

Tabel 5. Aspek Teknis

Aspek Teknis	Jumlah	Persentase
Memilih komoditas berdasar pada kalender tanam		
Rendah ($\leq 2,86$)	11	27,1
Tinggi (> 14)	29	72,9
Rataan = 2,86		
Memilih komoditas berdasar pada permintaan pasar		
Rendah ($\leq 2,75$)	12	30,0
Tinggi ($> 2,75$)	28	70,0
Rataan = 2,75		
Memilih komoditas berdasar pada kesuburan lahan		
Rendah ($\leq 2,75$)	17	42,5
Tinggi ($> 2,75$)	23	57,5
Rataan = 2,75		

Lanjutan Tabel 5

Aspek Teknis	Jumlah	Persentase
Memilih komoditas berdasar pada tipologi lahan		
Rendah ($\leq 2,0$)	27	50,8
Tinggi ($> 2,0$)	13	49,2
Rataan = 2,0		

Penjelasan: n=40

Sesuai riset di lapangan, mayoritas petani di lokasi *food estate* didominasi oleh komoditas tanaman padi, belajar dari pengalaman dan mencermati para petani lain dalam pengelolaan usaha taninya. Dengan begitu, aspek teknis secara terperinci dari segi membudidaya, mengenali jenis tanah, tipologi tanah, dan sebagainya yang secara teknis pertanian belum maksimal. Keterbatasan wawasan dan pemahaman terkait jenis maupun tipologi lahan bagi usaha tani ini akibat mayoritas petani milenial tanpa berlatar belakang pendidikan terkait pertanian, maka wawasan maupun pengetahuan mereka sekedar pada pengalaman yang didapat dari aktivitas pengelolaan usaha tani. Sesuai penjelasan Rachmat (2012), menyebut bila pengalaman merupakan kepekaan guna menjabarkan suatu objek dan peristiwa yang dialami. Pengalaman tanpa perlu dilalui melalui tahap belajar formal. Pengalaman tentu akan bertambah seiring dengan kejadian yang pernah ditemui. Makin banyak kejadian yang seseorang hadapi, maka orang itu makin responsif terhadap kejadian itu.

Pengalaman berupaya guna melaksanakan ini, terutama agar bisa tetap mengasah kemampuan teknis agar mayoritas indikator kompetensi teknis petani milenial berkategori tinggi. Sesuai penuturan Sumarlan *et al.*, (2012), menyebut bila dunia pertanian sudah petani tekuni semenjak berusia remaja, lamanya pengalaman bertani mengakibatkan petani bisa memperhatikan secara terperinci terkait segala sesuatu mengenai pengolahan pertanian di lahan kritis. Atas dasar itulah, kompetensi teknis harus ada di diri petani sebagai karakteristik utama yang bisa didapat melalui pengalaman yang terus terasah selama melaksanakan usaha di sektor pertanian.

Aspek Profitabilitas

Aspek profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh kelembagaan KEP dalam mendorong kemampuan yang dimilikinya baik dalam pemupukan modal, jenis usaha, dan pendapatan kelompok. Berdasarkan hasil deskriptif secara keseluruhan untuk aspek profitabilitas berada dalam kategori tinggi. Selengkapnya hasil tersebut pada Tabel 6.

Tabel 6. Aspek Profitabilitas

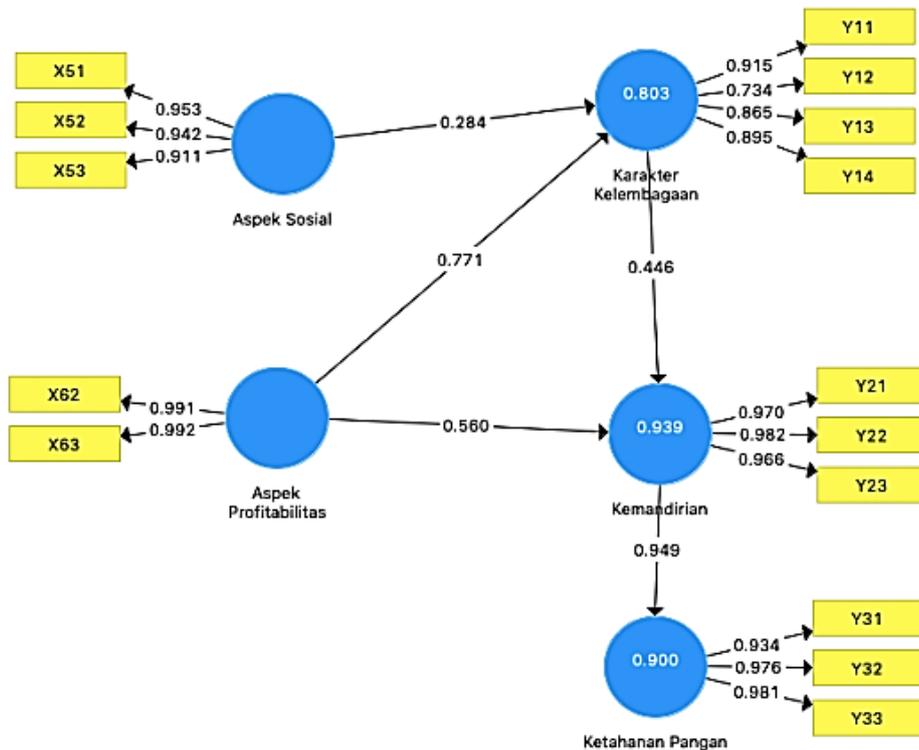
Aspek Profitabilitas	Jumlah	Persentase
Kepemilikan Modal		
Rendah ($\leq 2,55$)	13	32,5
Tinggi ($> 2,55$)	27	67,5
Rataan = 2,55		
Jenis Usaha		
Rendah ($\leq 2,68$)	18	45,0
Tinggi ($> 2,68$)	22	55,0
Rataan = 2,68		
Pendapatan Kelompok		
Rendah ($\leq 2,85$)	14	35,0
Tinggi ($> 2,85$)	26	65,0
Rataan = 2,85		

Penjelasan: n=40

Berdasarkan hasil kajian di lapangan tingkat profitabilitas anggota kelembagaan KEP telah menyadari bahwa pentingnya kelembagaan dalam menunjang kegiatan sehingga aspek profitabilitas telah disadari dan terinternalisasi dalam penyelenggaraan kegiatan kelembagaan. Pola pemupukan modal dan jenis usaha kelompok telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan rencana yang telah ditetapkan baik dari rencana definitif kelompok atau rencana usahatani yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Atas dasar itulah, kajian ini sesuai dengan Elizabeth (2019), menyebut bila eksistensi kelembagaan pertanian merepresentasikan kompetensi dan kinerja petani yang dicirikan melalui peningkatan produksi maupun produktivitas usaha tani yang cukup memengaruhi besar kecil penghasilan petani.

Faktor yang mempengaruhi KEP di lokasi *food estate*

Karakter kelembagaan KEP di lokasi *food estate* diduga dipengaruhi oleh faktor seperti anggota kelembagaan petani, performa kelembagaan petani, aspek manajerial, peranan sosial, aspek teknis, aspek profitabilitas, karakter KEP, kemandirian petani, dan ketahanan pangan. Hasil uji PLS menampakkan bila model memengaruhi aspek sosial dan aspek profitabilitas terhadap karakter kelembagaan. Model pengukuran (*outer model*) tertera di Gambar 1.



Gambar 1. Model Pengukuran (*outer model*)

Berdasarkan hasil model pengukuran didapat bila variabel yang memengaruhi kuat dalam karakter kelembagaan guna menunjang kemandirian dan ketahanan pangan adalah aspek sosial dan dan aspek profitabilitas. Kedua aspek ini menjadi penciri utama dalam karakter kelembagaan KEP. Hasil temuan ini merupakan salah satu rekomendasi yang dapat disampaikan ke pemangku kepentingan, bahwa pembentuk KEP yang memiliki karakter kuat dalam mendorong tumbuhnya KEP yang berorientasi bisnis di lokasi *food estate* adalah harus didasarkan pada modal sosial kelembagaan dan anggotanya yang berorientasi profitabilitas usahanya dan menguntungkan semua pihak. Hasil kajian memperlihatkan ketiga indikator memengaruhi langsung dan nyata. Ketiga indikator itu pun bernilai *factor loading* lebih dari 0,7, yakni 0,953, 0,942 dan 0,911, maka indikator itu bisa menjabarkan aspek sosial kelembagaan KEP.

Aspek sosial meliputi pengembangan masyarakat di aspek pendidikan, ekonomi, organisasi maupun pembangunan pertanian. Kekuatan yang ada di kelembagaan KEP, salah satunya ialah kemampuan untuk menjembatani kebutuhan petani dan keinginan pemangku kepentingan. Aspek sosial berperan menjadi modal sosial yang petani miliki, terutama bagi petani yang yang tergabung dalam kelembagaan KEP yang terepresentasikan melalui kemampuan mengorganisasi aktivitas masyarakat. Ada beberapa petani di daerah kajian yang mempunyai komunitas sendiri sebagai jejaring dan kemitraan sehingga bisa menggerakkan perekonomian di desa/wilayahnya. Sesuai kajian Haryanto, (2018); Yuniarti *et al.* (2020) dan Setiawan *et al.*, (2015), menyebut bila petani maju dan milenial mempunyai modal sosial tinggi sehingga bisa mereka jadikan sumber kemampuan sosial dalam pengelolaan, penggerak, serta sebagai contoh aktivitas usaha di wilayah/desanya.

Meskipun demikian, beberapa variabel yang menjadi bahan dalam kajian ini tidak memiliki pengaruh yang kuat tetapi menjadi salah satu langkah dalam melakukan pemberdayaan agar kemandirian petani

yang ada di wilayah pengembangan *food estate* meningkat kapasitasnya. Ciri anggota kelembagaan petani meliputi usia, pendidikan formal, luas lahan garapan, dan lama pengalaman berusaha tani. Hasil kajian memperlihatkan kurang memiliki pengaruh nyata dan langsung terhadap karakter kelembagaan petani. Perihal ini memperlihatkan bila kriteria anggota kelembagaan petani yang cenderung heterogen dan dapat menerima perubahan serta dinamika lainnya sehingga untuk karakter kelembagaan KEP di lokasi *food estate* tidak menjadi prasyarat utama dalam menumbuhkan hal tersebut. Perihal ini sesuai kajian milik Haryanto dan Yuniarti, (2017) dan Yuniarti *et al.* (2020) menuturkan bila tokoh petani telah bisa bersaing dengan perubahan pola budidaya tanaman yang kerap dikelola secara modern, luas, dan kejelasan pemasaran. Ciri anggota kelembagaan petani ini sebagai penguat bila masing-masing petani setidaknya mempunyai dua indikator agar usaha yang ia jalankan bisa bertahan lama dan resonansi yang diserahkan ke lingkungan sekitar, terkhusus anak muda kian membesar sehingga makin banyak generasi milenial memiliki ketertarikan ke bidang pertanian. Kendati luas lahan garapan tidak ada di model hasil PLS, tetapi kondisi di lapangan ini menggambarkan kinerja dari kriteria anggota kelembagaan petanisehingga sangat memengaruhi selama menjalankan suatu usaha tani.

Aspek teknis yang meliputi tahap memilih komoditas berdasar pada kalender tanam, permintaan pasar, kesuburan tanah, dan tifologi lahan. Hasil kajian memperlihatkan bila empat indikator tidak memengaruhi nyata dan langsung sehingga indikator itu tidak mampu merefleksikan aspek teknis yang dimiliki oleh kelembagaan KEP. Begitu juga dengan aspek manajerial yang terdiri dari pengelolaan usaha, jejaring kemitraan, mengelola sumberdaya yang dimiliki dan mengelola konflik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keempat indikator tidak memengaruhi nyata dan langsung. Aspek manajerial indentik dengan kepemimpinan yang dimiliki oleh ketokohan dari unsur kelembagaan KEP.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kelembagaan KEP merupakan lembaga yang baru dirumuhkan tetapi tokoh yang ada di wilayah tersebut berkemampuan kepemimpinan yang baik dalam mengelola usaha tani dan berjejaring dengan mitra lain untuk mendukung usahatani. Kepemimpinan dalam mengelola manajemen usahatani ini merupakan penciri khas dari petani di wilayah *food estate*. Sesuai kajian milik Suyadi dan Rimbawati, (2020) dan Rimbawati *et al.* (2018), menyebut bila kepemimpinan yang baik bisa merepresentasikan kemampuannya dalam mengelola suatu usaha dan penciri pribadi yang spesifik. Berdasarkan hal tersebut, meskipun bukan menjadi karakter kuat kelembagaan KEP di lokasi *food estate* tetapi aspek teknis dan manajerial ini merupakan aspek yang secara internal ada dan terkelola secara lahiriah ketika kelembagaan KEP tersebut berdiri.

Dampak dari karakter kelembagaan KEP ini adalah diharapkan adanya resonansi dan penumbuhan agropreneur-agropreneur baru. Berdasarkan hasil PLS, menunjukkan bahwa aspek sosial memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap lahirnya agropreneur baru. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Anwarudin dan Haryanto, (2018); Yuliani dan Sulaeman, (2012); Kiptot dan Franzel, (2014) yang mengungkapkan bahwa karakteristik yang ulet dan teladan dari petani maju yang tergabung dalam sebuah kelembagaan yang kuat dan sebagai bagian dari komunitas masyarakat dapat memberi contoh dan dorongan secara langsung atau tidak langsung kepada generasi muda untuk melakukan usaha yang sama di bidang pertanian. Kelembagaan KEP memiliki modal sosial dalam menggerakkan generasi muda pertanian untuk dapat berusaha di bidang pertanian sebagai bagian dari regenerasi pelaku pertanian.

Rekomendasi Pengembangan KEP Secara Operasional di Lokasi *Food Estate*

Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagai suatu tahap perubahan sosial terencana untuk dijadikan sarana pendorong perubahan dan pembaruan. Proses transformasi kelembagaan pada petani melalui pambangunan atau pengembangan kelembagaan seyogyanya dapat menjadikan kelembagaan menjadi bagian penting dalam kehidupan petani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan usahatannya. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani merupakan suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan, yang menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola kelakuan, dalam hubungan-hubungan kelompok, dalam persepsi-persepsi baru mengenai tujuan-tujuan maupun cara-cara.

Salah satu peran penyuluhan pertanian adalah mengembangkan kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi sendiri. Penyuluhan, sesuai penuturan Leeuwis dan van den Ban, (2004), diperjelas sebagai proses yang membantu petani dalam: menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan kedepan; meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan wawasan terhadap

suatu masalah, serta membantu menyusun kerangka berdasarkan pengetahuan yang dimiliki petani; memperoleh pengetahuan khusus berkaitan dengan cara pemecahan masalah yang dihadapi serta akibat yang ditimbulkan; memutuskan pilihan yang tepat yang menurut pendapat petani sudah optimal; meningkatkan motivasi petani untuk menetapkan pilihannya; dan mengevaluasi dan meningkatkan ketrampilan dalam membentuk pendapat dan mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil kajian dan studi empiris, rekomendasi yang dapat dirujuk dari hasil kajian ini seperti pembentukan KEP yang memiliki karakter kuat dalam mendorong tumbuhnya KEP yang berorientasi bisnis di lokasi *food estate* adalah harus didasarkan pada modal sosial kelembagaan dan anggotanya yang berorientasi profitabilitas usahanya dan menguntungkan semua pihak. Membentuk kelembagaan ekonomi petani di lokasi *food estate*, hal yang perlu dikuatkan dan diyakinkan kepada petani adalah dari aspek sosialnya dan tingkat profitabilitas ketika para petani tergabung dalam kelembagaan tersebut. Jenis usaha kelompok yang dijalankan oleh kelembagaan harus di kelola secara profesional dan mewakili sebagian besar usaha anggota petani. Pembagian hasil dalam pengelolaan pendapatan kelompok harus dijelaskan secara terbuka dan dilaporkan secara berkala.

KESIMPULAN

Karakter kelembagaan KEP di *food estate* memiliki ciri individu anggotanya dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah dan memiliki pengalaman berusaha yang cukup baik. Aspek teknis yang menonjol ada pada pemilihan komoditas berdasarkan kalender tanam, permintaan pasar, kesuburan lahan dan tipologi lahan, sedangkan Aspek manajerial yang kurang dari kelembagaan KEP adalah dalam hal mengelola konflik yang dapat terjadi dalam pengembangan usahanya. Aspek sosial sebagai kekuatan modal sosial sudah cukup baik dan tercermin dari keterlibatan dalam mengembangkan masyarakat pada aspek ekonomi dengan memberdayakan generasi muda di sekelilingnya untuk membantu dan terlibat dalam usahatani.

Berdasarkan hasil model pengukuran didapatkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh kuat dalam karakter kelembagaan untuk menunjang kemandirian dan ketahanan pangan adalah aspek sosial dan aspek profitabilitas. Kedua aspek ini menjadi penciri utama dalam karakter kelembagaan KEP. Aspek sosial yang terdiri dari pengembangan masyarakat pada aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek organisasi dan pembangunan pertanian. Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh kelembagaan KEP adalah kemampuannya dalam menjembatani kebutuhan petani dan keinginan pemangku kepentingan, sedangkan pada aspek profitabilitas ada pada jenis usaha dan pendapatan kelompok. Namun demikian secara keseluruhan, keenam indikator performas kelembagaan ini dapat menjadi penciri karakter kelembagaan KEP di lokasi *food estate* yang kuat dan perlu dimiliki untuk bisa menjadi triger dalam menggerakkan percepatan pengembangan kawasan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M. S. (2016). Factors influencing self-reliance in rice production, the case of small farmers in Bataan, Philippines. *International Journal of Agricultural Technology*, 12(1), 41–53.
- Alonge, H. O., IGE, A. M., & Osagıobare, O. E. (2014). Women Empowerment For Self-Reliance: Educational Management Strategies in Nigeria Case. *Journal of Educational and Social Research*, 4(1), 517–524. <https://doi.org/10.5901/jesr.2014.v4n1p517>
- Anantanyu, S. (2011). *Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya*. 7(2), 102–109.
- Anwarudin, O., & Haryanto, Y. (2018). The role of farmer-to-farmer extension as a motivator for the agriculture young generation. *International Journal of Social Science and Economic Research*, 3(1), 428–437.
- Baga L, Yanuar R, Karo-Karo F, A. (2009). *Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis*. Bogor: Departemen Agribisnis. Bogor (ID): Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Darmawan. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Effendy, L. (2020). Model Pengembangan Kelembagaan Petani Menuju Kelembagaan Ekonomi Petani. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 38–47.
- Elizabeth, R. G. (2019). Peningkatan Partisipasi Petani, Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kearifan

- Lokal Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 4(2), 48–61. <https://doi.org/10.24198/agricore.v4i2.26509>
- Emery, S. B. (2014). Independence and individualism: conflated values in farmer cooperation? *Agriculture and Human Values*, 32(1), 47–61. <https://doi.org/10.1007/s10460-014-9520-8>
- Emery, S. B., & Franks, J. R. (2012). The potential for collaborative agri-environment schemes in England: Can a well-designed collaborative approach address farmers' concerns with current schemes? *Journal of Rural Studies*, 28(3), 218–231. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2012.02.004>
- Fatchiya A. (2010). Tingkat Kapasitas Pembudidaya Ikan dalam Mengelola Usaha Aquakultur secara Berkelanjutan. *Penyuluhan*, 6(1), 11–18.
- Gotschi, E., Njuki, J., & Delve, R. (2008). Gender equity and social capital in smallholder farmer groups in Mozambique. *Journal Development in Practice*, 18(4), 650–657. <https://doi.org/10.1080/09614520802181970>
- Haryanto, Y. (2018). *Penguatan Kapasitas dan Kemandirian Tokoh Petani Maju sebagai Penyuluh Swadaya*. IPB.
- Haryanto, Y., Sumardjo, S., Amanah, S., & Tjitropranoto, P. (2018). Farmer to Farmer Extension Through Strengthening Progressive Farmers Role. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 6(2), 228–234.
- Haryanto, Y., & Yuniarti, W. (2017). The Role of Farmer to Farmer Extension for Rice Farmer Independence in Bogor. *International Journal of Research in Social Sciences*, 7(4), 62–74. Diambil dari ijsr: https://www.ijmra.us/2017ijrss_april.php
- Idoma, K., & Muhammad, I. (2013). Self-Reliance: Key to Sustainable Rural Development in Nigeria. *ARNP Journal of Science and Technology*, 3(6), 585–592. Diambil dari http://www.ejournalofscience.org/archive/vol3no6/vol3no6_3.pdf
- Kiptot, E., & Franzel, S. (2014). Voluntarism as an investment in human, social and financial capital: Evidence from a farmer-to-farmer extension program in Kenya. *Agriculture and Human Values*, 31(2), 231–243. <https://doi.org/10.1007/s10460-013-9463-5>
- Leeuwis C. & van den Ban. (2004). *Communication for Rural Innovation. Rethinking Agricultural Extension 3rd ed.* Oxford (UK): Blackwell Publishing.
- Manalu, D. S. T. (2011). *Strategi Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Petani (Bump) Pt Padi Energi Proklamasi Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat*. IPB.
- Niska, M., Vesala, H. T., & Vesala, K. M. (2012). Peasantry and Entrepreneurship As Frames for Farming: Reflections on Farmers' Values and Agricultural Policy Discourses. *Sociologia Ruralis*, 52(4), 453–469. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2012.00572.x>
- Prawiranegara. (2016). *Penguatan peran kelembagaan petani dalam peningkatan kapabilitas petani mengelola inovasi berbasis teknologi informasi*. Institut Pertanian Bogor.
- Rachmat, J. (2012). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riana, Satria, A., & Purnaningsih, N. (2015). The Role of Self-Support Extension Agents in Supporting Intensification Cocoa in Sigi District Central Sulawesi. *Jurnal Penyuluhan*, 11(2), 201–211.
- Rimbawati, D. E. manggala, Fatchiya, A., & Sugihen, B. G. (2018). Dinamika Kelompok Tani Hutan Agroforestry di Kabupaten Bandung. *Jurnal Penyuluhan*, 14(1). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i1.17223>
- Ruhimat S. (2014). Faktor-Faktor Untuk Peningkatan Kemandirian Petani Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat: Studi Kasus Di Desa Ranggung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(3), 237–249. <https://doi.org/10.20886/jsek.2014.11.3.237-249>
- Santosa, & Darwanto. (2015). Strategi Penguatan Kelompok Tani Dengan Penguatan Kelembagaan. *Ekonomi Pembangunan*, 33–45.

- Setiawan, I., Sumardjo, S., Satria, A., & Tjitropranoto, P. (2015). Strategi Pengembangan Kemandirian Pelaku Muda Agribisnis “ Brain Gain Actors” di Jawa Barat. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(2), 409. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1491>
- Sobel, J. (2002). Can we trust social capital. *Journal of Economic Literature*, 40, 139–154. <https://doi.org/10.1257/0022051027001>
- Subagio. (2008). *Peranan kapasitas petani dalam mewujudkan keberhasilan usaha tani: Kasus Petani Sayuran dan Padi di Kabupaten Malang dan Pasuruan Propinsi Jawa Timur*. Institut Pertanian Bogor.
- Sudarko. (2010). *Hubungan Dinamika dan Peran Kelompok dengan Kemampuan Anggota dalam Penerapan Inovasi Teknologi Usaha Tani Kopi Rakyat (Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Jawa Timur)*. Institut Pertanian Bogor.
- Sumardjo. (1999). *Transformasi model penyuluhan pertanian menuju pengembangan kemandirian petani (Kasus di Propinsi Jawa Barat) [disertasi]*. 1–372.
- Sumarlan, Sumardjo, Tjitropranoto P, dan G. D. (2012). Peningkatan kinerja petani sekitar hutan dalam penerapan sistem agroforestri di pegunungan kendeng Pati. *Agro Ekonomi*, 30(1), 25–39.
- Sutherland, L. A., & Burton, R. J. F. (2011). Good farmers, good neighbours? The role of cultural capital in social capital development in a Scottish farming community. *Sociologia Ruralis*, 51(3), 238–255. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2011.00536.x>
- Suyadi, & Rimbawati, D. (2020). Peran kepemimpinan tokoh informal terhadap kemandirian kelompok tani hutan. *Komunitas Online*, 1(2), 135–141.
- Syahra, R. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 1–22.
- Utami, & Sumardjo. (2006). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kemandirian Pengrajin Kulit di Kabupaten Sidoarjo dan Magetan, Jawa Timur. *Penyuluhan*, 2(4), 42–50.
- Yuliani, S. S., & Munandar Sulaeman, dan S. W. (2012). Hubungan Antara Karakteristik Penyuluh Swadaya Dengan Motivasi Peternak Sapi Perah. *Jurnal Unpad*, 1.
- Yuniarti, W., Sumardjo, Widiatmaka, & Wibawa, W. D. (2020). Brain gain actors: Farmers’ regeneration in Indonesia. *Journal of Human Ecology*, 71(1–3), 139–146. <https://doi.org/10.31901/24566608.2020/71.1-3.3253>
- Yunita, Sugihen, B. G., Asngari, P. S., Susanto, D., & Amanah, S. (2012). Strategi Peningkatan Kapasitas Rumah Tangga Petani Padi Sawah Lebak Menuju Ketahanan Pangan Rumah Tangga (Kasus di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan) The Strategy for Increasing of Lowland Rice Household Farmers Capacity Towards. *Jurnal Penyuluhan*, 8(1). Diambil dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=268142&val=7100&title=The Strategy for Increasing of Lowland Rice Household Farmers Capacity Towards Households Food Security>
- Yustika, A. E. (2013). *Ekonomi kelembagaan: paradigma, teori, dan kebijakan*. Malang: Erlangga.
- Zedadra, O., Guerrieri, A., Jouandeau, N., Seridi, H., Fortino, G., Spezzano, G. Thesis, A. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.